

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Istilah dan Singkatan	xi
Intisari	xii
Abstract	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Lansia di Indonesia	1
1.1.2. Kebijakan Penanganan Lansia	8
1.1.3. Permasalahan Lansia di Kabupaten Bantul	11
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	16
1.5. Kajian Literatur	17
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Kebijakan Publik	24
2.2. Implementasi Kebijakan	26
2.3. <i>Active Ageing</i>	30
2.3. Kerangka Berpikir Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	36
3.2. Teknik Pemilihan Narasumber	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data	38
3.4. Pengolahan dan Analisis Data	40
3.5. Lokasi Penelitian	41
3.6. Waktu Penelitian	42
BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
4.1. Kabupaten Bantul	43
4.2. Kapanewon Sewon	46
4.3. Kapanewon Piyungan	50
BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BKL	
5.1. Kebijakan Penanganan Permasalahan Lansia oleh Perwakilan BKKBN	

DIY	54
5.2. Implementasi Kebijakan Penanganan Lansia di Kabupaten Bantul	64
5.2.1 Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan	64
5.2.1.1 Dimensi Transmisi	64
5.2.1.2 Dimensi Konsistensi	67
5.2.1.3 Dimensi Kejelasan	69
5.2.2 Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan	71
5.2.2.1 Sumber Daya Manusia	72
5.2.2.2 Sumber Daya Wewenang	78
5.2.2.3 Sumber Daya Fasilitas/Sarana Prasarana	81
5.2.2.4 Sumber Daya Anggaran	84
5.2.3 Komitmen dalam Implementasi Kebijakan	86
5.2.4 Implementor/Aktor Implementasi Kebijakan	88
5.3. Hambatan dan Dukungan dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Lansia	91
5.3.1 Dukungan dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Lansia	91
5.3.1.1 Dukungan dalam Variabel Isi Kebijakan	91
5.3.1.2 Dukungan dalam Variabel Komitmen	92
5.3.1.3 Dukungan dalam Variabel Komunikasi	92
5.3.1.4 Dukungan dalam Variabel Sumber Daya	92
5.3.2 Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Lansia	88
5.3.2.1 Hambatan dalam Variabel Isi Kebijakan	93
5.3.2.2 Hambatan dalam Variabel Komitmen	93
5.3.2.3 Hambatan dalam Variabel Komunikasi	94
5.3.2.4 Hambatan dalam Variabel Sumber Daya	94
5.4 Kegiatan Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Bantul	95
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	97
6.1.1 Implementasi Kebijakan Penanganan Lanjut Usia di Kabupaten Bantul	97
6.1.2 Hambatan dan Dukungan Implementasi Kebijakan Penanganan Lanjut Usia	99
6.1.3 <i>Active Ageing</i> dalam Penanganan Permasalahan Lanjut Usia..	101
6.2. Rekomendasi Kebijakan	102
Daftar Pustaka	xiv
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur Tahun 2019	3
Tabel 1.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Tinggal Bersama Tahun 2020	6
Tabel 1.3	Jumlah Poktan BKL dan Anggota BKL Kabupaten/Kota Tahun 2020 di DIY	13
Tabel 1.4	Kader Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia Tahun 2020	14
Tabel 1.5	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1	Daftar Narasumber Wawancara Penelitian “Implementasi Kebijakan BKL di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”	37
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian	42
Tabel 4.1	Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	44
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kapanewon Sewon Tahun 2020	47
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kelompok Umur 60+ di Kapanewon Sewon Tahun 2020	47
Tabel 4.4	Kelompok BKL di Kapanewon Sewon	48
Tabel 4.5	Daftar PLKB/PKB di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB) Kapanewon Sewon	49
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kapanewon Piyungan Tahun 2020	51
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Kelompok Umur 60+ di Kapanewon Piyungan Tahun 2020	51
Tabel 4.8	Kelompok BKL di Kapanewon Piyungan	52
Tabel 4.9	Daftar PLKB/PKB di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB) Kapanewon Piyungan	53
Tabel 5.1	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020	57
Tabel 5.2	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Terkait Penanganan Lanjut Usia Di Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020	59
Tabel 5.3	Kebijakan Tentang Penanganan Lanjut Usia	59
Tabel 5.4	Pasal Kunci dalam Perban Pengelolaan Kelompok BKL	62
Tabel 5.5	Target Sasaran Penanganan Lansia oleh Perwakilan BKKBN DIY Berdasarkan Renstra	63

Tabel 5.6	Stratifikasi Kelompok BKL	81
Tabel 5.7	Jumlah Bina Keluarga Lansia Berdasarkan Kepemilikan SK Penguahan Tahun 2021	83
Tabel 5.8	Kegiatan Pengembangan di BKL di Kabupaten Bantul	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipe Pembuatan Kebijakan	25
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan Edward III (1980)	29
Gambar 2.3	Tiga Pilar Kerangka Kebijakan dalam <i>Active Ageing</i>	31
Gambar 2.4	Faktor Penentu dalam <i>Active Ageing</i>	33
Gambar 2.5	Kerangka Berpikir Penelitian	35
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Bantul	43
Gambar 4.2	Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	45
Gambar 4.3	Peta Kapanewon Sewon	46
Gambar 4.4	Peta Kapanewon Piyungan	50
Gambar 5.1	Mekanisme Pelaporan Bina Keluarga (Balita, Remaja, dan Lansia)	80

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Lanjut usia	: Lanjut usia selanjutnya disingkat lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
Keluarga Lansia	: Keluarga Lansia adalah keluarga yang memiliki satu atau beberapa anggota keluarga yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
Lansia Tangguh	: Lansia Tangguh adalah lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan produktif melalui penerapan 7 (tujuh) dimensi Lansia Tangguh, yaitu dimensi spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesional vokasional, dan lingkungan.
Lansia Rentan	: Lansia Rentan adalah lansia yang tidak mampu merawat dirinya sendiri karena mengalami keterbatasan fungsional, sebagian atau seluruhnya, baik fisik, mental, maupun spiritual sehingga memerlukan pendampingan dan perawatan jangka panjang.
Bina Keluarga Lansia (BKL)	: Bina Keluarga Lansia adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari lansia dan keluarga lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan lansia serta meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi pasangan usia subur.
Kader	: Kader adalah orang dewasa, baik pria maupun wanita yang dipandang sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan berupa keberhasilan dalam kegiatan, keluwasan dalam hubungan kemanusiaan, status sosial ekonomi dan kelebihan lainnya.
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	: Penyuluh Keluarga Berencana adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program KKBPK
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola, dan menggerakkan masyarakat dalam Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan.
Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	: Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.